

JUDUL: HAK GUGAT PEMERINTAH DALAM PENYELESAIAN
KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH PERTAMBANGAN

Nama: Melisa Pranata

Jurusan/Program Studi: Ilmu Hukum

Pembimbing: Marianus Yohanes Gaharpung, S.H., M.S. dan Wafia Silvi Dhesinta
Rini, S.H., M.H.

ABSTRACT

This research discusses the possibility of resolving environmental damage through government lawsuits for environmental recovery in mining areas that have experienced damage. The choice of resolution through the government's lawsuit mechanism is based on the non-compliance of mining businesses with various obligations, resulting in environmental damage that concerns public property. On the other hand, local governments often facilitate the issuance of environmental permits that do not align with preventive functions and fail to provide adequate supervision, as seen in the case of PT AHB. Therefore, the focus of the issue is on the resolution of environmental damage through government lawsuits. The objective is to understand the interconnection between supervision, government lawsuits, and compensation payments by environmental offenders. A normative legal research type is employed with a regulatory approach and a conceptual approach to comprehensively address the issues. The research findings indicate that the issuance of environmental permits is the starting point for environmental damage, and PT AHB is identified as an environmental offender meeting all the elements of unlawful acts in environmental cases. Thus, environmental damage resulting from mining activities can be held accountable through lawsuits by local governments against environmental offenders, based on the polluter pays principle and the precautionary principle.

Keywords: *government lawsuits, environmental permits, environmental damage, mining.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kemungkinan penyelesaian kerugian lingkungan hidup melalui hak gugat pemerintah guna pemulihan lingkungan hidup di wilayah pertambangan yang telah mengalami kerusakan. Pilihan penyelesaian melalui mekanisme hak gugat pemerintah didasari oleh ketidakpatuhan pelaku usaha pertambangan terhadap berbagai kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup yang menyangkut hak milik publik. Di sisi lain, pemerintah daerah justru memudahkan penerbitan izin lingkungan yang tidak sesuai dengan fungsi pencegahan dan tidak melakukan pengawasan yang memadai seperti yang terjadi dalam perkara PT AHB. Untuk itu, permasalahannya dititikberatkan pada penyelesaian kerugian lingkungan hidup melalui hak gugat pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai adalah memahami keterkaitan pengawasan, pengajuan hak gugat oleh pemerintah, serta pembayaran ganti rugi oleh perusak lingkungan hidup. Tipe penelitian yuridis normatif digunakan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep agar dapat menjawab permasalahan secara komprehensif. Hasil penelitian menemukan bahwa penerbitan izin lingkungan menjadi titik awal dari kerusakan lingkungan hidup dan PT AHB sebagai perusak lingkungan hidup yang memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dalam perkara lingkungan hidup. Maka, kerugian lingkungan hidup akibat usaha pertambangan dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui gugatan oleh pemerintah daerah kepada perusak lingkungan hidup dengan berlandaskan pada prinsip pencemar membayar dan prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: hak gugat pemerintah, izin lingkungan, kerugian lingkungan hidup, pertambangan.